

Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Di Kabupaten Lombok Tengah

Suparlan¹, Lalu Muh. Mizan Asrori², Miftahatul Khairani Ulfa³, Unida Ismadianti⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Received Mei 20, 2026 Revised Mei 23, 2026 Accepted Mei 24, 2026</p> <hr/> <p>Kata Kunci:</p> <p>Value for Money Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Efisiensi Efektivitas</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p><i>Value for Money</i> <i>Financial Performance</i> <i>Local Government</i> <i>Efficiency</i> <i>Effectiveness</i></p>	<p>Penelitian mengenai kinerja keuangan sektor publik menunjukkan perkembangan yang signifikan. Akan tetapi, studi yang khusus menggunakan pendekatan Value for Money di tingkat pemerintah daerah masih cukup jarang, terutama dalam konteks perubahan yang terjadi pasca pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah antara tahun 2020-2024 dengan menerapkan pendekatan Value for Money yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam penelitian ini, diterapkan metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan efisiensi, dan menafsirkan tren kinerja selama lima tahun tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah mengalami perubahan dari fase tekanan pada tahun 2020-2021, menuju fase pemulihan antara tahun 2022-2023, dan akhirnya mencapai optimalitas pada tahun 2024. Rasio efektivitas menunjukkan peningkatan yang signifikan, melampaui 100%, sedangkan rasio efisiensi tetap berada di bawah 100%. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan tanpa adanya pengeluaran yang berlebihan. Namun, tingkat efisiensi yang tinggi mengindikasikan adanya potensi pengeluaran yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dampaknya terhadap kualitas layanan publik. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat penerapan pendekatan Value for Money sebagai cara untuk mengevaluasi kinerja sektor publik, tidak hanya dengan fokus pada penggunaan anggaran tetapi juga pada kualitas pengelolaan tersebut.</p> <hr/> <p>ABSTRACT</p> <p><i>Research on public sector financial performance has shown significant progress. However, studies specifically using the Value for Money approach at the local government level are still quite rare, especially in the context of post-pandemic changes. This study aims to evaluate the financial performance of the Central Lombok Regency Government between 2020 and 2024 using a Value for Money approach that encompasses economic, efficiency, and effectiveness aspects. This study employed a descriptive quantitative method utilizing secondary data consisting of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the Budget Realization Report (LRA). The analysis was conducted by calculating Effectiveness and Efficiency Ratios and interpreting performance trends over the five years. The results show that regional financial performance experienced a shift from a phase of stress in 2020-2021, to a recovery phase between 2022-2023, and finally reaching optimality in 2024. The effectiveness ratio showed a significant increase, exceeding 100%, while the efficiency ratio remained below 100%. These</i></p>

findings indicate that the local government was able to increase revenue without excessive spending. However, the high efficiency rate indicates underutilized spending potential, which requires further investigation regarding its impact on the quality of public services. This research contributes to strengthening the application of the Value for Money approach as a means of evaluating public sector performance, focusing not only on budget utilization but also on the quality of its management.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Unida Ismadianti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
Mataram, Indonesia
Email: unidaismadianti01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penelitian mengenai kinerja keuangan sektor publik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, tetapi kajian yang secara khusus menggunakan pendekatan Value for Money di tingkat pemerintah daerah masih sangat terbatas, terutama dalam situasi pascapandemi [16]. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2020-2024 dengan menerapkan pendekatan Value for Money yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas [15].

Studi ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) [18]. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas dan efisiensi serta menginterpretasikan tren kinerja selama lima tahun. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa performa keuangan daerah mengalami perubahan dari fase sulit (2020-2021), menuju periode pemulihan (2022-2023), hingga mencapai tingkat optimal pada tahun 2024 [16]. Rasio efektivitas mengalami peningkatan yang signifikan, melebihi angka 100%, sementara efisiensi masih di bawah 100% [15].

Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan pendapatan namun tidak diimbangi dengan pengeluaran yang berlebihan. Namun begitu, tingkat efisiensi yang tinggi juga mencerminkan adanya potensi pengeluaran yang mungkin belum optimal, yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik [1]. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat penerapan pendekatan Value for Money sebagai salah satu metode dalam mengevaluasi kinerja sektor publik, yang tidak hanya berfokus pada pemanfaatan anggaran, tetapi juga pada kualitas manajemennya. Mardiasmo (2023) VFM merupakan sebuah konsep manajemen di sektor publik yang berlandaskan pada tiga elemen utama, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Unsur pertama dalam konsep VFM adalah ekonomi. Ekonomi berkaitan dengan pendapatan. Masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu yang diperoleh dengan harga yang paling rendah. Untuk meminimalisir pemborosan serta menekan biaya produksi, hal ini menjadi langkah strategis bagi organisasi publik dalam menggunakan sumber daya input mereka secara optimal [7]. Elemen kedua adalah efisiensi. Efisiensi merujuk pada pencapaian tingkat keluaran tertentu dengan memanfaatkan input yang paling sedikit dan dapat diandalkan [15]. Unsur terakhir adalah efektivitas. Efektivitas berhubungan dengan sejauh mana hasil yang diinginkan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya [10]. Berbagai penelitian tentang pengukuran kinerja menggunakan pendekatan Value For Money telah dilakukan. Sebagai contoh, penelitian oleh Sri Pujiyanti, Susilowati, dan Erni Yulianti (2025) menunjukkan bahwa

secara umum, kinerja keuangan Desa Pasirngangka dapat dikategorikan sebagai efektif dan efisien (Pujiyanti et al., 2025). Namun, pada tahun 2022 dan 2024, aspek ekonomi mengalami beberapa kendala (Mahmudi, 2023). Ketidak ekonomisan di tahun 2022 disebabkan oleh adanya kebijakan baru melalui peraturan Bupati Kabupaten Tangerang No.37 Tahun 2022, yang mengharuskan penganggaran untuk program Rumah Layak Huni (RTLH) yang tidak terduga dalam APBDes awal. Di sisi lain, pada tahun 2024, meningkatnya inflasi menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi, sehingga pengeluaran melebihi anggaran yang direncanakan [3]. Walau demikian, efisiensi dan efektivitas tetap terjaga berkat pencapaian pendapatan yang umumnya memenuhi, bahkan melampaui target yang ditetapkan [7]. Rumusan permasalahan dalam studi ini adalah bagaimana evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 jika dialokasikan dengan metode Value for Money. Sebagai salah satu wilayah otonom, Kabupaten Lombok Tengah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, tingginya realisasi anggaran tidak selalu mencerminkan kinerja yang memuaskan jika tidak diimbangi dengan hasil output dan outcome yang optimal. Oleh karena itu, analisis kinerja dengan menggunakan pendekatan Value for Money sangatlah diperlukan [4]. Kinerja Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari tabel Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut :

PAD		BELANJA DAERAH	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Rp 2.685.754.476.568,00	Rp 2.729.660.115.585,25	Rp 2.704.051.992.251,00	Rp 2.617.596.128.124,98

Menurut tabel di atas, Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebesar Rp2.685.754.476.568,00. Dari jumlah tersebut, realisasi PAD yang berhasil diperoleh adalah Rp2.729.660.115.585,25. Ini menunjukkan bahwa pencapaian PAD melebihi target anggaran yang telah ditentukan [4]. Selain itu, Anggaran belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebesar Rp2.704.051.992.251,00. Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat sebanyak Rp2.617.596.128.124,98. Pencapaian belanja yang lebih rendah dibandingkan anggaran menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengatur pengeluaran dan mencegah pemborosan anggaran [8]. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja menunjukkan adanya efisiensi serta kehati-hatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, realisasi belanja yang tidak sepenuhnya sesuai dengan anggaran juga perlu ditelisik lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengurangan belanja tersebut tidak mengganggu pencapaian output dan layanan publik [3].

Ketika menganalisis perbandingan antara realisasi PAD dan belanja daerah, terlihat bahwa realisasi PAD lebih tinggi dibandingkan dengan belanja daerah. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan dalam pengelolaan keuangan daerah pada periode tersebut [14]. Situasi ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang cukup baik, di mana pendapatan asli daerah dapat membiayai belanja daerah tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan pada dana dari pemerintah pusat [11]. Selain itu, kondisi ini juga menandakan bahwa stabilitas keuangan daerah relatif terjaga.

Secara keseluruhan, data mengenai anggaran serta realisasi PAD dan pengeluaran daerah di Kabupaten Lombok Tengah mengindikasikan bahwa keadaan keuangan daerah dalam kondisi yang positif. Pendapatan yang diperoleh melebihi anggaran mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan pendapatan daerah, sedangkan pengeluaran yang lebih rendah dibandingkan anggaran menunjukkan adanya perencanaan pengeluaran yang baik [9]. Keadaan ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik [6].

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan kategori penelitian deskriptif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan keadaan kinerja finansial daerah berdasarkan data yang ada tanpa menguji hipotesis. Fokus penelitian adalah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2020 - 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengkajian dokumentasi. Pendekatan Value for Money dalam penelitian ini berlandaskan pada konsep pengukuran kinerja sektor publik yang menekankan keterkaitan antara input, output, dan outcome. Menurut Mardiasmo (2023), Value for Money merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang berfokus pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, Mahmudi (2024) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik tidak hanya mengukur besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga menilai seberapa besar anggaran tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi penting untuk menilai kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. Secara konseptual:

- a. Ekonomi berkaitan dengan pengadaan input dengan biaya minimal
- b. Efisiensi menunjukkan hubungan antara input dan output
- c. Efektivitas mengukur tingkat pencapaian tujuan atau outcome

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

1. **Rasio Efektivitas**

$$Efektivitas = \frac{RealisasiPendapatan}{AnggaranPendapatan} \times 100\%$$

2. **Rasio Efisiensi**

$$Efisiensi = \frac{RealisasiBelanja}{AnggaranBelanja} \times 100\%$$

Kriteria penilaian:

- a. Efektivitas >100% : sangat efektif
- b. Efisiensi <100% : efisien

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Temuan Utama (Time Series APBD 2020/2024)

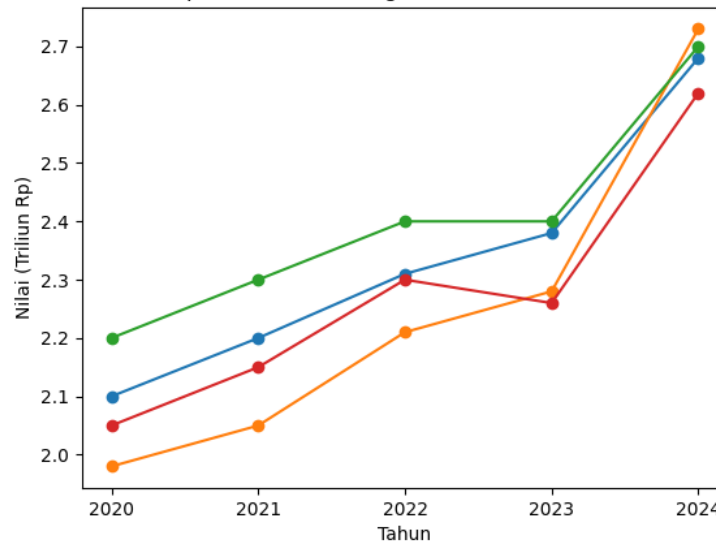
Agar mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, analisa dilakukan tidak hanya pada satu tahun, melainkan dalam periode lima tahun terakhir. Hal ini memungkinkan pola kinerja keuangan daerah terlihat dengan lebih jelas, apakah bersifat stabil, mengalami fluktuasi, atau justru menunjukkan peningkatan.

Tabel 2. Perkembangan APBD Kabupaten Lombok Tengah 2020-2024

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2020	Rp2,10 T	Rp1,98 T	Rp2,20 T	Rp2,05 T
2021	Rp2,20 T	Rp2,05 T	Rp2,30 T	Rp2,15 T
2022	Rp2,31 T	Rp2,21 T	Rp2,40 T	Rp2,30 T
2023	Rp2,38 T	Rp2,28 T	Rp2,40 T	Rp2,26 T
2024	Rp2,68 T	Rp2,73 T	Rp2,70 T	Rp2,62 T

Tahun 2023, pendapatan yang dihasilkan mencapai sekitar Rp2,278 triliun, yang berarti sekitar 95,7% dari target yang ditetapkan, sementara belanja yang terangkai mencapai sekitar 94,15%.

Tren APBD Kabupaten Lombok Tengah 2020–2024 (dalam Triliun Rupiah)



Gambar 1. Tren APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa tren anggaran dan realisasi APBD di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun 2020 ke 2024 [6]. Di awal periode, yaitu antara tahun 2020 - 2021, pergerakan realisasi untuk pendapatan dan belanja cenderung berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya tekanan dalam aspek fiskal, yang secara logis bisa dihubungkan dengan dampak pandemi terhadap aktivitas ekonomi di daerah tersebut [9].

Saat memasuki tahun 2022 dan 2023, grafik mulai menunjukkan pola yang lebih konsisten. Selisih antara anggaran dan realisasi semakin menyusut, yang menandakan terjadinya perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran [11]. Di fase ini, performa keuangan daerah mulai terlihat pulih dan lebih terkelola.

Puncaknya terjadi di tahun 2024, ketika realisasi pendapatan melebihi anggaran yang telah ditentukan. Sementara itu, realisasi belanja tetap berada di bawah anggaran. Pola ini menunjukkan kombinasi yang menarik antara efektivitas dan efisiensi, di mana pihak pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan tanpa disertai dengan pembelanjaan yang berlebihan [14].

Meskipun demikian, jika dianalisis lebih jauh, pola pengeluaran yang konsisten di bawah anggaran ini juga memberikan peluang untuk interpretasi lain, yaitu ada kemungkinan bahwa beberapa program tidak sepenuhnya dijalankan. Oleh karenanya, walaupun secara umum kinerja terlihat positif, analisis yang lebih mendalam tetap diperlukan untuk memastikan bahwa efisiensi yang dicapai tidak mengorbankan kualitas layanan publik [4].

3.1.2 Perhitungan Rasio Value for Money

1. Rasio Efektivitas (Pendapatan)

Rumus:

$$Efektivitas = \frac{RealisasiPendapatan}{AnggaranPendapatan} \times 100\%$$

Tahun	Efektivitas
2020	94,3%

Tahun	Efektivitas
2021	93,2%
2022	95,7%
2023	95,7%
2024	101,6%

- a. 2020-2023 : cukup efektif (mendekati target)
- b. 2024 : sangat efektif (melampaui target)

2. Rasio Efisiensi (Belanja)

Rumus:

$$Efisiensi = \frac{RealisasiBelanja}{AnggaranBelanja} \times 100\%$$

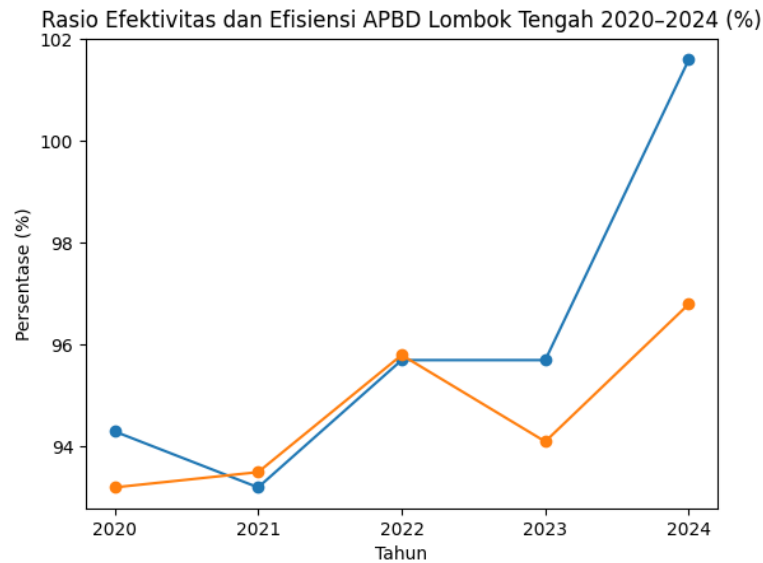
Tahun	Efisiensi
2020	93,2%
2021	93,5%
2022	95,8%
2023	94,1%
2024	96,8%

- a. Seluruh periode menunjukkan **efisiensi (di bawah 100%)**
- b. Tidak ada indikasi pemborosan besar

3. Rasio Ekonomi (Belanja terhadap Anggaran)

(Prinsip sama dengan efisiensi untuk input biaya)

Tahun	Ekonomi
2020	Ekonomis
2021	Ekonomis
2022	Cukup ekonomis
2023	Ekonomis
2024	Sangat ekonomis



Gambar 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2, dapat diamati bahwa rasio efektivitas dan efisiensi APBD Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan konsistensi yang cukup stabil, meskipun ada perubahan pada beberapa periode. Rasio efektivitas pada tahun 2020 dan 2021 tercatat di bawah 95 persen, yang menandakan bahwa pendapatan yang direalisasikan masih belum sepenuhnya memenuhi target yang sudah ditetapkan [9]. Situasi ini bisa dipahami sebagai dampak dari tekanan ekonomi pada waktu itu [6]. Namun, mulai tahun 2022-2023, rasio efektivitas menunjukkan peningkatan dan berada di kisaran 95 persen, yang menunjukkan adanya pembenahan dalam pengelolaan pendapatan daerah [11]. Menariknya, pada tahun 2024, rasio efektivitas meningkat pesat hingga melampaui 100 persen [14]. Ini berarti bahwa pendapatan yang direalisasikan tidak hanya mencapai target, tetapi juga melebihi proyeksi yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan berada pada kondisi yang sangat baik [7].

Di sisi lain, pola rasio efisiensi menunjukkan stabilitas yang lebih. Seluruh periode berada di bawah 100 persen, yang mengindikasikan penggunaan anggaran belanja dapat dikatakan efisien [4]. Meskipun begitu, terdapat tren peningkatan rasio efisiensi setiap tahun, yang menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran semakin mendekati target [9].

Ketika kedua rasio ini dianalisis secara bersamaan, tampak bahwa pada tahun 2024 terjadi kombinasi yang ideal, yakni efektivitas yang tinggi bersama dengan efisiensi yang tetap terjaga [6]. Namun, situasi ini tetap perlu dievaluasi secara lebih mendalam, terutama untuk memastikan bahwa efisiensi yang tercapai tidak mengorbankan kualitas keluaran dan pelayanan publik [4].

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa performa keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah antara tahun 2020 dan 2024 mengalami kemajuan yang cukup berarti [9]. Jika dianalisis secara berurutan, terdapat pola menarik, di mana pada tahap awal (2020-2021) performa keuangan cenderung mengalami tekanan [6]. Hal ini terlihat dari rasio efektivitas yang masih berada di bawah 95%, menunjukkan bahwa penerimaan belum sepenuhnya memenuhi target yang ditentukan.

Memasuki tahun 2022-2023, keadaan mulai menunjukkan perbaikan. Rasio efektivitas meningkat dan hampir mencapai target, sementara efisiensi tetap terjaga [11]. Pada tahap ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mulai menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan

ekonomi yang ada. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana rasio efektivitas melampaui 100% [14]. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tidak hanya mencapai target, tetapi juga melebihi perencanaan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, rasio efisiensi tetap berada di bawah 100%, yang berarti penggunaan anggaran belanja masih dalam kategori efisien [4].

Jika kedua indikator ini dianalisis secara bersamaan, tampak adanya perpaduan yang cukup ideal antara efisiensi dan efektivitas [7]. Pemerintah daerah berhasil meningkatkan pendapatan tanpa dilengkapi dengan peningkatan pengeluaran yang berlebihan. Meski begitu, keadaan ini tetap memerlukan analisis yang lebih mendalam.

Temuan dari studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian oleh Yulitiawati dan Rusmidarti (2020) yang menampilkan bahwa kinerja sektor publik cenderung dalam kategori ekonomis dengan pengelolaan anggaran yang terjaga. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian ini, di mana realisasi pengeluaran yang berada di bawah anggaran menunjukkan adanya kontrol terhadap biaya.

Lebih lanjut, temuan dari penelitian ini juga mendukung hasil yang disampaikan oleh Setiawan *et al.* (2020) yang menyebutkan bahwa pendekatan Value for Money dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja sektor publik melalui perspektif ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam penelitian ini, ketiga sudut pandang tersebut terbukti dapat menjelaskan performa keuangan daerah secara keseluruhan.

Namun, bila dibandingkan dengan penelitian oleh Pujiyanti, Susilowati, dan Yulianti (2025), terdapat perbedaan yang cukup menarik untuk dicermati. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa aspek ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor luar seperti inflasi dan perubahan kebijakan. Sementara dalam kajian ini, kondisi tersebut tidak tampak secara signifikan, yang mengindikasikan bahwa stabilitas pengelolaan keuangan daerah relatif lebih terjaga.

Di sisi lain, temuan dari riset ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Taufik, Suhendra, dan Nurjanah (2022) yang mengungkapkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat mengalami pergeseran disebabkan oleh faktor luar seperti pandemi. Ini terlihat pada fase awal penelitian (2020-2021), di mana kinerja keuangan menghadapi tekanan sebelum pada akhirnya pulih di tahun-tahun selanjutnya.

Jika dianalisis lebih dalam, efisiensi yang tinggi memang menunjukkan bahwa tidak ada pemborosan dalam pengelolaan anggaran [12]. Namun dalam ranah sektor publik, keadaan ini tidak selalu bisa diartikan sebagai kinerja yang sepenuhnya positif [17].

Tingginya efisiensi berpotensi menunjukkan adanya *under-spending*, yaitu situasi di mana anggaran yang direncanakan tidak sepenuhnya diimplementasikan [13]. Ini mungkin mencerminkan bahwa program-program yang direncanakan tidak berjalan dengan optimal atau bahkan tertunda pelaksanaannya [2].

Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan tidak cukup hanya berfokus pada analisis rasio, tetapi harus diikuti dengan pengamatan sejauh mana anggaran itu benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat [5].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa performa finansial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rentang waktu 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang positif. Pada tahun-tahun awal, yakni 2020–2021, kinerja finansial berada dalam keadaan yang cukup tertinggal, yang terlihat dari rasio efektivitas yang belum memenuhi target yang ditentukan. Situasi ini bisa dipahami sebagai akibat dari faktor-faktor eksternal, terutama pandemi yang berdampak pada kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Memasuki tahun 2022-2023, performa finansial mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ini dapat dilihat dari peningkatan rasio efektivitas yang semakin mendekati target, serta efisiensi yang tetap terjaga pada level yang baik. Puncak performa terjadi pada tahun 2024, di mana rasio efektivitas mencapai lebih dari 100%, menandakan bahwa realisasi

pendapatan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melebihi rencana yang telah dibuat. Di sisi lain, rasio efisiensi tetap kurang dari 100%, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja masih berada dalam kategori efisien. Secara keseluruhan, dengan menggunakan pendekatan Value for Money, kinerja finansial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat diklasifikasikan sebagai baik, karena berhasil menunjukkan keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Namun, tingginya tingkat efisiensi ini juga harus ditafsirkan dengan hati-hati, karena dapat jadi menandakan adanya under-spending yang bisa memengaruhi pelaksanaan program secara optimal.

REFERENSI

- [1] Ammons, D. N., & Roenigk, D. J. (2019). Tools for evaluating public sector performance: Balancing efficiency and service quality. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/puar.13010>
- [2] Ananda, R., & Prasetyo, Y. (2025). Implementasi anggaran dan efektivitas program pembangunan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah*, 13(1), 22–35.
- [3] Badan Pusat Statistik. (2024). *Inflasi dan perkembangan ekonomi Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id>
- [4] Halim, A. (2021). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- [5] Hidayat, T. (2024). Evaluasi kinerja keuangan daerah berbasis value for money dan implikasinya terhadap pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 16(2), 88–102.
- [6] Kurniawan, A., & Lestari, D. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berbasis value for money. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(2), 45–58.
- [7] Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- [8] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- [9] Nugraha, R. (2024). Efisiensi belanja daerah dan kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 18(1), 77–90.
- [10] OECD. (2022). *Government at a glance 2022: Performance and effectiveness in public sector*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3d5c5f61-en>
- [11] Pratama, I. G. A., Sari, N. P., & Putra, K. (2023). Analisis kemandirian fiskal daerah melalui PAD dan belanja daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(1), 33–47.
- [12] Putra, D. A., & Laksmi, N. P. (2023). Efisiensi anggaran dan pengelolaan keuangan sektor publik. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Daerah*, 11(3), 55–70.
- [13] Ramadhan, F., & Siregar, H. (2022). Under-spending dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(2), 101–114.
- [14] Sari, M., & Wulandari, R. (2022). Evaluasi efektivitas pengelolaan APBD berbasis value for money. *Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan*, 10(3), 101–115.
- [15] Setiawan, A., et al. (2020). Pengukuran kinerja sektor publik berbasis Value for Money. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(2), 56–70.
- [16] Taufik, A., Suhendra, R., & Nurjanah, S. (2022). Dampak pandemi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 11(1), 1–15.
- [17] Wijaya, I. M., Santoso, B., & Arifin, Z. (2024). Efisiensi versus efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Governance dan Akuntabilitas Publik*, 14(1), 40–52.
- [18] Yulitiawati, R., & Rusmidarti. (2020). Analisis kinerja keuangan daerah melalui pendekatan Value for Money. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 88–99.